BAB II
TINJAUAN TEORI

2.1 Tinjauan Hierarki Pusat Pelayanan Kota

Hierarki (dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah urutan tingkatan atau jenjang kedudukan. Pusat adalah pokok pangkal atau yang menjadi tumpuan berbagai hal, urusan, dan sebagainya. Pelayanan adalah kemudahan yang diberikan seperti contoh dalam jual beli barang atau jasa. Sedangkan hierarki kota (Manta, 2006) adalah hubungan antarkegiatan yang berpengaruh terhadap pola pemanfaatan ruang.

Menurut UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan rencana struktur ruang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana.Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten
Rencana pengembangan pusat pelayanan kegiatan kegiatan kota menggambarkan lokasi pusat-pusat pelayanan kegiatan kota, hirarkinya, cakupan/skala layanannya, serta dominasi fungsi kegiatan yang diarahkan pada pusat pelayanan kegiatan tersebut

Menurut Nia K. Pontoh dan Iwan Setiawan (2008) dalam Surachman (2013), unsur pembentuk struktur tata ruang kota terdiri dari tiga yaitu pusat kegiatan, kawasan fungsional, dan jaringan jalan. Kota atau kawasan perkotaan pada dasarnya dapat dipandang sebagai suatu sistem spasial, yang secara internal mempunyai unsur-unsur yang menjadi pembentuknya serta keterkaitannya satu sama lain. Kota sebagai suatu sistem/tata ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak, yang mencirikan kawasan dengan kegiatan utama bukan pertanian. Wujud struktural pemanfaatan ruang kota adalah unsur-unsur pembentuk kawasan perkotaan secara hierarkis dan struktural berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk tata ruang kota. Wujud struktural pemanfaatan ruang kota di

antaranya meliputi hierarki pusat pelayanan kegiatan perkotaan, seperti pusat kota, pusat bagian wilayah kota, dan pusat lingkungan; yang ditunjang dengan sistem prasarana jalan seperti jalan arteri, kolektor, dan lokal.

Menurut Rustianingsih (1993) dalam Tuti (2006), faktor-faktor dalam penentuan pusat pelayanan wilayah adalah:

1. Pengelompokkan penduduk

   Suatu pusat membutuhkan pendukung agar dapat tumbuh dan berkembang. Faktor yang mendukung ini adalah penduduk yang berada di kawasan-kawasan permukiman yang berada dalam wilayah pelayanannya. Faktor-faktor dalam pengelompokkan ini antara lain jumlah penduduk, kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk, dan luas kawasan permukiman.

   Jumlah dan kepadatan penduduk dapat menggambarkan efisiensi penggunaan ruang dan distribusi penduduknya. Pertumbuhan penduduk menggambarkan kemampuan kawasan tersebut untuk menampung penduduk, semakin besar tingkat pertumbuhan penduduk semakin tinggi tingkat perkembangan kawasan itu. Luas kawasan permukiman diperlukan untuk memperoleh untuk memperoleh gambaran mengenai distribusi ruang konsumen yang akan dilayani oleh suatu pusat pelayanan. Semakin luas kawasan permukiman yang akan dimiliki, maka semakin tinggi nilainya.

2. Ketersediaan fasilitas pelayanan

   Fasilitas pelayanan yang penting adalah fasilitas pelayanan dan jasa, pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan hiburan. Fasilitas-fasilitas pelayanan ini berfungsi sebagai penarik perkembangan dari lingkungan. Fasilitas-fasilitas penduduk ini sangat dibutuhkan oleh penduduk dalam kehidupan sehari-hari dan dalam frekuensi yang tinggi.

   Adapun fasilitas-fasilitas pelayanan pelayanan yang digunakan dalam penentuan pusat pelayanan kota adalah:

   - Fasilitas perdagangan dan jasa terdiri dari: pasar, pusat perbelanjaan, supermarket/swalayan, toko, kios/warung, bank, pangkalan angkutan.

- Fasilitas pendidikan terdiri dari TK, SD, SLTP, SLTA, akademi/perguruan tinggi.
- Fasilitas kesehatan, terdiri dari: rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah bersalin, apotek.
- Fasilitas peribadatan, terdiri dari: masjid, musholla, gereja, vihara, pura.
- Fasilitas hiburan, terdiri dari: bioskop, taman lingkungan

Dengan demikian kecamatan yang telah memiliki berbagai jenis fasilitas pelayanan akan memiliki kesempatan lebih besar untuk dipilih menjadi lokasi subpusat pelayanan kota. Semakin banyak jenis dan jumlah fasilitas pelayanannya maka semakin potensial lokasi tersebut menjadi pusat pelayanan.

3. Kemudahan Aksesibilitas

   Mengingat karakteristik kegiatan, distribusi penduduk, kendala dan daya tamping fisik lingkungan berbagai macam kegiatan fungsionalyang ada dalam suatu kota atau kawasan tidak mungkin berkumpul dalam satu lokasi, melainkan menyebar di beberapa atau banyak lokasi. Keadaan yang demikian itu adalah awal terjadinya pergerakan manusia dan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Namun tingkat kemudahan untuk mencapai suatu tempat tertentu ke tempat lainnya tidak selalu sama, bahkan sering terdapat perbedaan yang sangat mencolok. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat kemudahan hubungan ini antara lain kelengkapan fasilitas dan system transportasi , kendala fisik wilayah dan karakteristik/pola pergerakan.

   Kawasan yang memiliki tingkat kemeudahan tinggi, lazimnya merupakan pilihan utama dari sebagian besar penduduk. Oleh sebab itu hampir dipastikan bahwa wilayah yang memiliki tingkat hubungan yang relatif tinggi akan lebih cepat berkembang bila dibandingkan dengan wilayah lain yang memiliki tingkat hubungan rendah.

   Pengukuran tingkat kemudahan pencapaian didasarkan pada tingkat kemudahan hubungan dengan menggunakan dua indikator: fungsi jalan dan dilalui oleh angkutan. Setiap klasifikasi fungsi jalan menggambarkan jenis

lalu lintas yang melalui jalan tersebut dan tempat-tempat yang dihubungkannya. Semakin tinggi fungsi jalan, maka semakin jauh jarak yang dihubungkannya dan biasanya fungsi jalan terdapat kaitan dengan fingsi kegiatan yang dilewati oleh jalan tersebut. Hal ini menggambarkan skala pelayanan dari kegiatan yang ada. Penilaian dilakukan berdasarkan pada panjang jalan yang sesuai dengan fungsinya (arteri dan kolektor). Semakin panjang jalan yang ada di lokasi tersebut semakin tinggi nilainya. Sedangkan jumlah rute angkutan dan jumlah kendaraan angkutan, dalam keadaaannya mempertimbangkan bahwa lingkungan yang dilalui oleh rute angkutan akan memudahkan mobilisasi pergerakan penduduk pada lingkungan tersebut. Penilaian dilakukan dengan berdasarkan jumlah rute angkutan dan jumlah kendaraan angkutan yang melalui rute tersebut.

Variabel-variabel yang telah diuraikan di atas, akan digunakan sebagai variabel dalam perhitungan indeks sentralitas.

Analisis hierarki suatu wilayah dapat dilakukan melalui analisis fungsi wilayah. Analisis fungsi wilayah merupakan analisis terhadap fungsi-fungsi pelayanan yang terdapat di wilayah amatan. Analisis yang dilakukan menggunakan cara analisis fungsi pemukiman.. Melalui analisis ini diharapkan akan diketahui mengenai tata jenjang dan distribusi pusat-pusatpelayanan dalam suatu wilayah (Riyadi, 2005). Tingkat layanan diketahui dari jumlah unit setiap instrumen layanan dan persentasenya di setiap kabupaten atau kota. Wilayah dengan total nilai skor merupakan wilayah dengan tingkat layanan tertinggi.Wilayah dengan nilai lebih tinggi juga menunjukkan bahwa wilayah tersebut lebih bersifatperkotaan dibandingkan dengan wilayah lainnya.

2.2 Tinjauan Fasilitas Pelayanan

Pusat kota adalah suatu titik/daerah pada suatu kota yang memiliki peran sebagai pusat dari segala kegiatan kota antara lain politik, sosial budaya, ekonomi dan teknologi (Yunus, 2002:17). Peran tersebut dijalankan melalui jasa pelayanan yang diberikan oleh fasilitas-fasilitas umum maupun sosial yang ada di dalamnya. Oleh

karena itu, suatu pusat harus memiliki kelengkapan fasilitas yang baik dan memadai. Fasilitas-fasilitas tersebut harus dapat melayani seluruh peduduk kota.

Menurut Jayadinata (1999) dalam Manta (2006), kota sebagai pusat pelayanan, diharapkan memiliki fasilitas pelayanan seperti; (1) pusat dan pertokoan sebagai fokus point dari suatu kota, (2) sarana dan prasarana transportasi, (3) tempat rekreasi dan oleh raga, dan (4) sarana pendidikan, kesehatan dan obyek wisata. Dengan demikian kota menyediakan segala fasilitas bagi kehidupan baik sosial maupun ekonomi, sehingga baik tempat tinggal maupun bekerja dan berkreasi dapat dilakukan dalam kota.

Fasilitas-fasilitas tersebut merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan penduduk. Semakin lengkap penyediaan fasilitas-fasilitas di suatu tempat berarti semakin kuat daya tarik mengundang penduduk dan kegiatan-kegiatan produktif untuk datang ke tempat tersebut. Dalam meningkatkan pembangunan wilayah harus diupayakan untuk memanfaatkan peran kota-kota sebagai pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan.

Menurut Burhanuddin (2007), semakin banyak jenis fasilitas yang digunakan dalam perhitungan skalogram atau indeks sentralitas maka akan semakin menghasilkan hasil yang bagus. Sarana adalah fasilitas untuk melancarkan pelaksanaan suatu fungsi. Dalam konteks perkotaan penyelenggaraan pelayanan sosial kota memerlukan penyediaan fasilitas sosial, sehingga setiap penduduk kota mudah mendapatkan pelayanan sosial dnan meningkatkan kesejahteraannya.

Menurut Sujarto (1986), sarana (fasilitas) dapat diartikan sebagai suatu aktivitas ataupun materi yang berfungsi melayani kebutuhan individu di dalam suatu lingkungan kehidupan. Secara sistematis aktivitas maupun materi tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu fasilitas sosial dan fasilitas fisik. Fasilitas sosial dapat diartikan sebagai aktivitas atau sarana pelayanan yang dapat melayani kebutuhan masyarakat yang bersifat dapat memberikan kepuasan sosial, mental, spiritual, diantaranya adalah sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana perdagangan, sarana rekreasi, dan olah raga serta pemakaman umum. Sedangkan fasilitas fisik adalah aktivitas atau sarana yang dapat melayani masyarakat akan

kebutuhan fisik, yaitu prasarana umum termasuk air minum, sanitasi lingkungan, sistem drainase, gas, listrik, jalan raya serta sarana perumahan.

Pembagian jenis fasilitas umum perkotaan (*urban public facilities*) atau jenis sarana pelayanan umum, menurut Sujarto (1986) antara lain adalah:

a. sarana kelembagaan, meliputi:
- kantor pemerintah
- lembaga hankam
- perkantoran
- balai kota

b. Sarana pelayanan dan kesejahteraan, meliputi:
- peribadatan
- kesehatan
- pendidikan

c. Sarana pelayanan ekonomi, meliputi:
- warung/kios
- toko
- pasar lingkungan
- pusat perbelanjaan
- pusat pergudangan

d. Sarana rekreasi, meliputi:
- tempat bermain/taman kota
- balai pertemuan
- gedung kesenian / bioskop
- tempat olah raga
- pusat kebudayaan
- museum

e. sarana transportasi, meliputi:
- terminal
- subterminal

Jenis-jenis dari fasilitas pelayanan tersebut di atas akan digunakan sebagai pendukung variabel fasilitas yang telah disebutkan dalam penentuan pusat pelayanan yang telah dikemukakan oleh Rustianingsih.

Semua pelayanan masyarakat tersebut di atas mempunyai fungsi, ukuran, radius pelayanan yang berbeda-beda tergantung besar kecilnya serta luasnya fungsi dan peranan suatu lingkungan tertentu. Dalam hal ini akan terdapat pengertian tingkatan (hierarki) dari pusat-pusat pelayanan masyarakat tersebut. Semakin besar fungsi dan peranan suatu lingkungan tertentu di dalam pelayanan masyarakat semakin besar pula peranan dan fungsi dari pusat-pusat pelayanannya baik dari segi ukuran maupun kualitasnya.

2.3 Tinjauan Kependudukan

Menurut Tuti (2006), pada dasarnya pusat pelayanan melayani penduduk sehingga faktor kependudukan sangat penting. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin menyolok perkembangan penduduknya dan semakin tinggi tingkat perkembangan lokasi tersebut karena segala aktivitas kegiatan penduduk akan menimbulkan kebutuhan ruang yang mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya suatu wilayah. Faktor kependudukan dalam penilaian tingkat pertumbuhan wilayah ada 3 yaitu:

1. Jumlah penduduk
2. Kepadatan penduduk
3. Pertumbuhan penduduk

Ketiga variabel dari faktor penduduk tersebut akan ditransformasikan ke dalam nilai indeks. Selanjutnya total indeks akan diklasifisikan menurut klasifikasi kriteria tinggi, sedang, dan rendah.

2.4 Tinjauan Aksesibilitas

Menurut Black (1981) dalam Parlindungan (2010), aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan lokasi tata guna lahan yang berinteraksi satu sama lain, dan mudah atau sulitnya lokasi tersebut dicapai melalui transportasi. Salah satu variabel yang dapat dinyatakan apakah tingkat aksesibilitas itu tinggi atau rendah dapat dilihat dari banyaknya sistem jaringan yang tersedia pada daerah tersebut.

Semakin banyak sistem jaringan yang tersedia pada daerah tersebut maka semakin mudah aksesibilitas yang didapat begitu pula sebaliknya semakin rendah tingkat aksesibilitas yang didapat maka semakin sulit daerah itu dijangkau dari daerah lainnya (Bintarto, 1989). Tingkat aksesibilitas wilayah juga bisa diukur berdasarkan pada beberapa variabel yaitu ketersediaan jaringan jalan, jumlah alat transportasi, panjang, lebar jalan, dan kualitas jalan.

Sedangkan menurut Bina Marga yang dimaksud dengan aksesibilitas adalah jumlah panjang jalan di suatu wilayah dalam satuan kilometer dibagi dengan luas wilayah tersebut dalam satuan kilometer persegi. Dalam melakukan evaluasi kinerja jaringan jalan diperlukan suatu perhitungan yang mewakili kondisi suatu jalan. Evaluasi ini dinyatakan dalam suatu indeks yang dinamakan Indeks Prasarana Jalan (IPJ). Menurut Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah perhitungan IPJ berkaitan dengan empat variabel penting, yaitu :

1. Ketersediaan jalan : merupakan perbandingan antara total panjang jalan dengan luas wilayah
2. Kinerja jalan : perbandingan antara total panjang jalan dengan jumlah kenderaan dalam suatu wilayah
3. Beban lalu lintas : perbandingan antara total panjang jalan dengan jumlah kenderaan dalam suatu wilayah
4. Pelayanan jalan : perbandingan antara total panjang jalan dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah

2.5 Tinjauan Analisis

2.5.1 Indeks Sentralitas

Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2005), matriks indeks sentralitas merupakan bagian dari matriks fungsi wilayah atau yang sering disebut dengan analisis fungsi yang merupakan analisis terhadap fungsi-fungsi pelayanan yang tersebar di wilayah studi, dalam kaitannya dengan berbagai aktivitas penduduk/masyarakat, untuk memperoleh/memanfaatkan fasilitas-fasilitas tersebut.

Indeks sentralitas dimaksudkan untuk mengetahui struktur/hierarki pusat-pusat pelayanan yang ada dalam suatu wilayah perencanaan pembangunan, seberapa

banyak fungsi yang ada, berapa jenis fungsi dan berapa jumlah penduduk yang dilayani serta seberapa besar frekuensi keberadaan suatu fungsi dalam satu satuan wilayah permukiman. Frekuensi keberadaan fungsi menunjukkan jumlah fungsi sejenis yang ada dan tersebar di wilayah tertentu, sedangkan frekuensi kegiatan menunjukkan tingkat pelayanan yang mungkin dapat dilakukan oleh suatu fungsi tertentu di wilayah tertentu.

2.5.2 *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

AHP merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multi faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki, menurut Saaty (1993) dalam Syaifullah (2010), hirarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi level dimana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. Dengan hirarki, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompoknya yang kemudian diatur menjadi suatu bentuk hirarki sehingga permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan sistematis.

Layaknya sebuah metode analisis, AHP pun memiliki kelebihan dan kelemahan dalam system analisisnya. Kelebihan-kelebihan analisis ini adalah:

- Kesatuan (*Unity*)

  AHP membuat permasalahan yang luas dan tidak terstruktur menjadi suatu model yang fleksibel dan mudah dipahami.

- Kompleksitas (*Complexity*)

  AHP memecahkan permasalahan yang kompleks melalui pendekatan sistem dan pengintegrasian secara deduktif.

- Saling ketergantungan (Inter Dependence)

  AHP dapat digunakan pada elemen-elemen sistem yang saling bebas dan tidak memerlukan hubungan linier.

- Struktur Hirarki (*Hierarchy Structuring*)

AHP mewakili pemikiran alamiah yang cenderung mengelompokkan elemen sistem ke level-level yang berbeda dari masing-masing level berisi elemen yang serupa.

- Pengukuran (*Measurement*)
  AHP menyediakan skala pengukuran dan metode untuk mendapatkan prioritas.
- Konsistensi (*Consistency*)
  AHP mempertimbangkan konsistensi logis dalam penilaian yang digunakan untuk menentukan prioritas.
- Sintesis (*Synthesis*)
  AHP mengarah pada perkiraan keseluruhan mengenai seberapa diinginkannya masing-masing alternatif.
- *Trade Off*
  AHP mempertimbangkan prioritas relatif faktor-faktor pada sistem sehingga orang mampu memilih altenatif terbaik berdasarkan tujuan mereka.
- Penilaian dan Konsensus (*Judgement and Consensus*)
  AHP tidak mengharuskan adanya suatu konsensus, tapi menggabungkan hasil penilaian yang berbeda.
- Pengulangan Proses (*Process Repetition*)
  AHP mampu membuat orang menyaring definisi dari suatu permasalahan dan mengembangkan penilaian serta pengertian mereka melalui proses pengulangan.

Sedangkan kelemahan metode AHP adalah sebagai berikut:

- Ketergantungan model AHP pada input utamanya. Input utama ini berupa persepsi seorang ahli sehingga dalam hal ini melibatkan subyektifitas sang ahli selain itu juga model menjadi tidak berarti jika ahli tersebut memberikan penilaian yang keliru.
- Metode AHP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik sehingga tidak ada batas kepercayaan dari kebenaran model yang terbentuk.

2.6 Studi Terdahulu

Suatu penelitian tidak menutup kemungkinan adanya kesamaan tema dengan penelitian lain. Bagi penelitian baru, adanya studi terdahulu akna memberikan dampak positif bagi penelitian yang akan akan dilakukan. Dari studi terdahulu yang sama, seorang peneliti dapat mendapatkan gambaran mengenai objek studi dan metode analisis yang digunakan oleh peneliti sebelumnya.

Pada penelitian ini terdapat tiga penelitian sejenis yang akan membantu dalam proses penelitian. Penelitian sejenis atau studi terdahulu itu adalah "Penetapan Hierarki Pusat-pusat Pelayanan Wilayah Kabupaten Sumbawa"oleh Tuti, mahasiswa S1 PWK Universitas Brawijaya Tahun 2006; "Penentuan Hierarki Pusat Pelayanan Kabupaten Bima" oleh M. Arshadlin, mahasiswa S1 PWK Universitas Brawijaya Tahun 2009.

Adapun perbandingan penelitian ini dengan studi terdahulu adalah dapat dilihat dalam Tabel 2.1:

Tabel 2.1 Studi Terdahulu

No.	Nama peneliti	Tuti (2006)	M. Arshadlin (2009)
1.	Judul penelitian	Penetapan Hierarki Pusat-pusat Pelayanan Wilayah Kabupaten Sumbawa	Penentuan Hierarki Pusat Pelayanan Kabupaten Bima
2.	Lokasi Penelitian	Kabupaten Sumbawa	Kabupaten Bima
	Tahun Penelitian	2006	2009
	Tujuan Penelitian	• Mengidentifikasi perubahan struktur pusat-pusat pelayanan eksisting wilayah Kabupaten Sumbawa akibat adanya pemisahan wilayah bagian barat. • Mengidentifikasi daerah-daerah yang berpotensi menjadi pusat wilayah. • Memberikan arahan hierarki pusat-pusat pelayanan	• Mengidentifikasi kecamatan mana saja yang memiliki tingkat pertumbuhan paling tinggi bila dilihat dari faktor pengaruh yang ada. • Mengidentifikasi pembagian hierarki serta kecamatan sebagai alternantif untuk menjadi ibu kota Kabupaten Bima yang baru berdasarkan sudut pandang para ahli • Memberikan arahan hierarki pusat-pusat pelayanan di Kabupaten Bima yang baru.
	Variabel	• Jumlah penduduk • Kepadatan penduduk • Pertumbuhan penduduk • Kawasan perumahan • Fasilitas pelayanan • Fungsi jalan	• Jumlah penduduk • Kepadatan penduduk • Pertumbuhan penduduk • Kawasan perumahan • Fasilitas pelayanan • Fungsi jalan

No.	Nama peneliti	Tuti (2006)	M. Arshadlin (2009)
	Metode Analisis	• Angkutan umum • Analisis Hierarki Pusat Pelayanan • Analisis Ekonomi Wilayah • Analisis Penentuan Lokasi Potensial untuk dijadikan lokasi Pusat-pusat pelayan • Analisis penentuan lokasi pusat-pusat pelayanan • Analisis Proyeksi penduduk • Analisis Kebutuhan Fasilitas Pelayanan	• Angkutan umum • Analisis Hierarki Pusat Pelayanan • Analisis Interaksi Sosial • Analisis Penentuan Lokasi Potensial untuk Dijadikan Lokasi Pusat-pusat pelayanan • Analisis Pennetuan Lokasi Pusat-pusat pelayanan • Analisis Penempatan Titik Lokasi Pusat-Pusat Pelayanan Wilayah • Analisis Proyeksi Penduduk • Analisais Kebutuhan Fasilitas Pelayanan
	Perbedaan	• Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pusat pelayanan, bukan untuk mengetahui faktor penentu pusat pelayanan	• Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pusat pelayanan yang baru dan memberikan rekomendasi, bukan untuk mengetahui faktor penentu pusat pelayanan
	Manfaat	• Penelitian ini bermanfaat dalam membantu peneliti dalam menentukan variabel bagi indeks sentralitas	• Penelitian ini bermanfaat dalam membantu peneliti dalam menentukan variabel bagi indeks sentralitas

2.4 Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan alur teori yang akan dibahas untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah untuk mendapatkan kesimpulan dan tujuan yang diinginkan. Adapun kerangka teori dalam penelitian ini adalah ditunjukkan dalam Gambar 2.1:

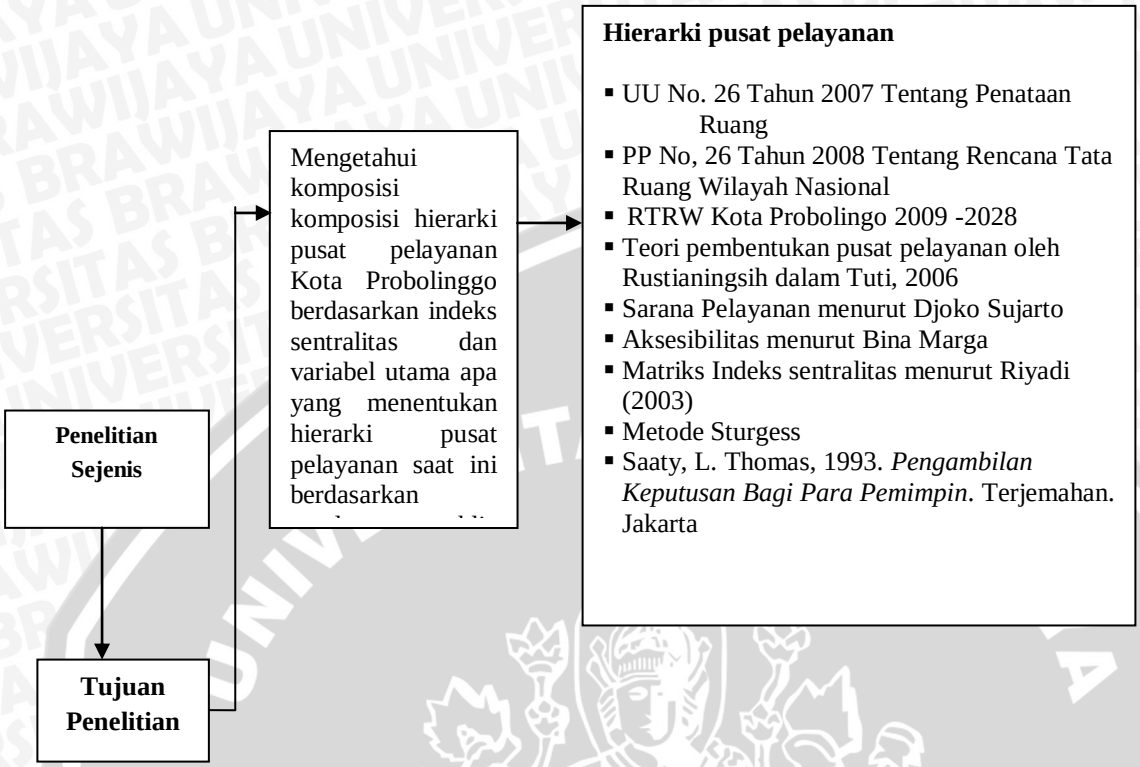

Gambar 2.1 Kerangka Teori